



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDY KASUS DI DESA PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020)

DESNITA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : desnita012@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dikantor Camat Benai kecamatan Benai Kabupaten Kuantan singingi tujuan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa didesa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kualitatif. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu Camat Benai, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Dan Kesimpulan. Hasil penulisan ini dapat penulis simpulkan Bahwa Peranan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa (Study Kasus di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020) sudah berjalan dengan baik dan terlaksana dengan maksimal. Hasil ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yang menunjukkan bahwa peranan Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa (Study Kasus di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuatan Singingi Tahun 2020) sangat baik.

Kata kunci : Pembinaan Pemerintahan Desa

Abstract

This research was carried out at the Benai sub-district office, Benai sub-district, Kuantan district. The purpose of this study was to find out how the role of the sub-district head in village government development in Pulau Lancang village, Benai sub-district, Kuantan Singingi district in 2020. The type of research used in this study was a qualitative research informant taken in this study. people, namely the Benai Sub-district Head, the Camat Secretary, the Head of Government, the Village Head, the Village Secretary, the Social Service for Community Empowerment. The data collection method used in this research is the method of interview, documentation, and observation. Triangulation Data analysis used is data collection, data reduction, Data Presentation and Verification and conclusions. The results of this writing can be concluded that the role of the Camat in developing village government (Case Study in Pulau Lancang Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency in 2020) has been going well and carried out optimally. These results can be seen from the results of interviews with informants in the field which show that the role of the Camat in Village Government Development (Case Study in Pulau Lancang Village, Benai District, Strong Singingi Regency in 2020) is very good.

Keywords: Village Government Development



1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana tenang lahir dan batin serta dinamis. Apabila diperhatikan Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara nasional di tingkat desa terus meningkat menuntut hal itu menjadi perhatian pemerintah, hal itu dilihat dengan semakin banyaknya Dana yang dialokasikan untuk Desa yang langsung ke Desa hal itu menuntut penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk lebih tertib dan teratur dalam upaya menuju Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal itu penting, oleh karena keberhasilan penyusunan perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan sampai ke tingkat pusat berdasarkan pada data informasi yang akurat yang berasal dari Desa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, adapun yang berperan dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan adalah pemerintahan kecamatan. Salah satu bentuk pembinaan yang mesti dilakukan pemerintahan kecamatan adalah melakukan pembinaan administrasi pemerintahan desa, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang untuk terlaksananya pemerintahan desa yang baik. Pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha ataupun sistem pengadministrasian yang benar. Tata Usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang termasuk pada Bab IV mengenai kedudukan tugas dan wewenang pasal 15 Ayat 1 dan 2 menyatakan Tugas Camat sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.



Disamping itu yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, yang meliputi :mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan.

Untuk menciptakan hal diatas maka diperlukan suatu konsep pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa tersebut. Agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, oleh karena itu diperlukan kemampuan dari pada para pimpinan pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan kepada pemerintahan desa.

Adapun bentuk dari pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendididkan dan latihan kepada pemerintah Desa sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan dapat juga dilakukan melalui adanya dorongan dan bimbingan serta pengarahan kepada para pemerintahan Desa agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan menurut Siagian (1990:3) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju ke arah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan yang diadakan haruslah dapat meningkatkan Sumber daya manusia Indonesia kearah yang lebih baik. Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, camat dalam hal ini sebagai pimpinan organisasi pemerintahan kecamatan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya system pembinaan ini diharapkan dapat menghasilkan mutu yang baik dari Pemerintahan Desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara professional dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif yang berdaya guna dan berhasil guna.

Berikut ini akan ditampilkan data perkembangan tingkat Desa dan Kelurahan menggambarkan keadaan yang ada di Desa dan keseluruhan di Kecamatan Benai keadaan tahun 2020 seperti pada tabel I berikut.

Tabel I.1 : Kategori perkembangan desa IDM (indeks desa membangun) Tahun 2020 Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Desa	Kecamatan	IKE 2020	Status IDM 2020
1	Benai Kecil	Benai	0,6000	Berkembang
2	Banjar Benai	Benai	0,2167	Tertinggal
3	Talontam	Benai	0,3667	Tertinggal
4	Koto Benai	Benai	0,4667	Tertinggal
5	Gunung Kesiangan	Benai	0,4833	Berkembang



6	Banjar Lopak	Benai	0,6167	Berkembang
7	Ujung Tanjung	Benai	0,5333	Tertinggal
8	Tanjung Simandolak	Benai	0,4500	Tertinggal
9	Pl Kalimantan	Benai	0,4833	Tertinggal
10	Pl Tongah	Benai	0,5833	Tertinggal
11	Pulau Lancang	Benai	0,4000	Tertinggal
12	Tb Tinggi	Benai	0,6167	Berkembang
13	Pl Ingu	Benai	0,5500	Berkembang
14	Simandolak	Benai	0,5833	Berkembang
15	Siberakun	Benai	0,5500	Tertinggal
16	Kelurahan Benai	Benai	0,6000	Berkembang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020

Dari data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas–tugas camat sebagai Pembina belum berjalan efektif terhadap 15 desa dan 1 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Benai pada tahun 2020 IDM (Indeks Desa Membangun) terdapat 7 (tujuh) diantaranya termasuk desa Berkembang sedangkan 9 (sembilan) desa diantaranya termasuk desa Tertinggal.

Dari hal tersebut penulis mengambil salah satu desa yang ada di kecamatan yang perlu diberikan pembinaan yaitu Desa Pulau Lancang karena dilihat dari 15 desa satu kelurahan di tengok dari IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) desa Pulau Lancang Termasuk desa Tertinggal mencapai angka 0,4000, sehingga dari aparat pemerintahan sangat perlu sekali diadakannya pembinaan agar desayang ada di Kecamatan Benai ini mengalami perkembangan dibidang pembangunan dan perekonomian.

Berdasarkan Fenomena diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:**Peranan Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa (Study kasus di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020).**

Rumusan Permasalahan

Bagaimana Peranan Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa (Study kasus di Desa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020).

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Peranan Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

2. LANDASAN TEORI

Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Administrasi secara sempit berasal dari kata administratie yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk



menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan (Handayani, 2002:2).

Administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration serangkain kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkain kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia (The Liang Gie, 2009:9).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (dalam Syafie, 2010:2022).

Menurut Pasolong administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik dimaksud untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional (dalam Mulyadi, 2016:33).

Menurut Simon (2014:12) administrasi adalah sebagai aktivitas-aktivitas kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Gie (dalam Siagian, 2014:12) administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan pelaksanaan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori/Konsep Sumber Daya Manusia

Menurut Riant Nugroho (2017:105) sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi begitu juga sumber daya manusia organisasi.

Menurut Sumarsono (dalam Riant Nugroho, 2017:106) menyatakan bahwa, sumber daya manusia mempunyai dua pengertian mendasar. Pengertian pertama, bahwa sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diperbaiki dalam proses produksi. Pengertian kedua, bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja adalah mengetahui dan mengerti cara bekerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang aparatur untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sebagai tanggung jawabnya. Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan definisi diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Dengan berpegangan pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power).

Sedangkan menurut Suwanto dan Priansa (2011:10), Manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.

Peranan sumber daya manusia menurut Hasibuan (2011:14), adalah :



1. Menetapkan jumlah, kualitas tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan *job descriptio, job specification, job requirment, dan evaluation*.
2. Menetapkan penarikan, seleksi dan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right pleace and the right job*.
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penilaian prestasi kerja karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangon.

Teori/Konsep Pembinaan

Menurut Saydam Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Saydam, 2000:408).

Saudjana menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memilihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Apabila pada suatu waktu terjadi penyimpangan-penyimpangan maka dilakukan upaya untuk mengembalikan kegiatan kepada yang seharusnya dilaksanakan atau kembali ke perencanaan semula (Saudjana, 2000:223).

Saudjana juga menegaskan pembinaan diartikan sebagai rangakain upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai mana mestinya sehingga recana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna (Saudjana, 2000: 223).

Menurut Thoha mengartikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan lebih baik, dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal (Thoha, 2004:7).

Sedangkan menurut Pamudji (dalam Thoha, 2000:12) mengartikan pembinaan adalah sebagaimana pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai lebih tinggi. Dengan demikian, pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu : melakukan usaha- usaha untuk menjadi lebih sesuai atau lebih cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik.

Widodo mendefinisikan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Widodo, 1984:23).

Pembinaan juga merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan jauh lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas



berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan, kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

Tugas-Tugas Camat

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Tugas Camat :

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6).
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan.

Fungsi Camat Terhadap Pemerintahan Desa

Peran Camat dalam sebuah pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki camat, Camat dikatakan berperan apabila dirinya melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dimiliki tersebut. Fungsi Camat yang dimaksud dengan magang riset terapan Pemerintahan ini adalah bagaimana camat mengordinasikan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan tersebut menandakan bahwa tugas pokok dan fungsinya yang dimiliki telah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Levinson dalam Soekarno (2012:2013) terdapat beberapa hal yang menunjukkan Bahwa seorang camat dikatakan berperan yaitu meliputi adanya norma-norma/ peraturan adanya konsep mengenai apa yang dilakukan, dan berupa adanya perilaku individu di masyarakat.

1. Peran dalam Norma-Norma

Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan baik secara formal melalui regulasi maupun non formal melalui kebiasaan dan adat di masyarakat.

2. Peran apa yang dapat dilakukan oleh individu

Terkait pembinaan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan telah memprogramkan kegiatan yang bernama Bimwas atau pembimbing dan pengawasan. Program Bimwas ini dilakukan setiap 4 bulan sekali selama 1 tahun dimana pihak kecamatan nantinya akan mengadakan pembinaan dan pengawasan secara langsung turun disetiap desa untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

3. Peran dalam Perilaku Individu

Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dimana perilaku individu ini merupakan komitmen dalam melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dapat dilihat melalui persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar yang dimiliki setiap masing-masing individu yang berkaitan dalam pembinaan camat terhadap pemerintahan Desa.

Teori/Konsep Kepemimpinan



Menurut Black (dalam Samsudin,2006:287) Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mampu bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah unik dan tidak dapat diwariskan secara otomatis. Setiap pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi yang berbeda.

Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

- a. Ricky W. Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.
- b. Stephen P. Robbins mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.
- c. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data Kualitatif. Menurut Sugiono (2014 : 14) data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian dengan pendekatan naturalistik/kualitatif kebanyakan datanya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantitatif.

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, kemudian disusun sedemikian tepat dan akan dianalisis dengan cara memberikan gambaran secara umum dengan disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan mengenai Indikator Pelatihan (*Training*) Pembinaan pemerintahan Desa dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan formal yang diberikan pihak kecamatan kepada pemerintahan Desa sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun akan tetapi pelatihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan non formal sering diberikan pihak Kecamatan Kepada Pemerintahan Desa sehingga setiap desa dapat menerima masukan dengan baik dan benar. Namun akan tetapi pelatihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Pelatihan Bagaimana Pelatihan formal dan non formal yang diberikan pihak kecamatan kepada pemerintahan Desa yaitu bentuk pelatihan yang diberikan oleh pemerintahan kecamatan jarang dilaksanakan dan begitu juga dari pihak Kabupaten. Berdasarkan kesimpulan terhadap indikator Pelatihan (*Training*) Pembinaan pemerintahan Desa penulis di lapangan bahwa pelatihan formal dan non formal



sudah berjalan dengan baik bahwa pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Pelatihan kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun dari pihak Kabupaten tidak pernah melakukan Pelatihan terhadap Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan mengenai indikator Peninjauan (*Monitoring*) Pembinaan Administrasi Desa dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan secara berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desanya yaitu bentuk peninjauan yang diberikan pihak Pemerintahan Kecamatan terhadap Pemerintahan Desa itu sudah berjalan dengan baik. Namunakan tetapi peninjauan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan secara tidak berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desanya yaitu bentuk peninjauan yang diberikan pihak Pemerintahan Kecamatan terhadap Pemerintahan Desa itu sewaktu-waktu berjalan dengan baik, dilaksanakannya peninjauan ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam bidang Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat. Namunakan tetapi peninjauan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa Sub indikator Peninjauan tentang Bagaimana bentuk peninjauan yang diberikan Pemerintahan Kecamatan kepada Desa Pulau Lancang yaitu bentuk peninjauan yang kami terima itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada seperti memberikan arahan-arahan tentang perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa. Berdasarkan kesimpulan penulis dilapangan bahwa peninjauan sudah berjalan dengan baik dari pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Peninjauan kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun dari pihak Kabupaten tidak pernah melakukan Pelatihan terhadap Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan mengenai indikator Evaluasi (*Evaluation*) Pembinaan pemerintahan Desa dapat diketahui bahwa sub indikator Evaluasi secara berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desanya yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Namunakan tetapi evaluasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa sub indikator Evaluasi secara tidak berkala yang diberikan pihak Kecamatan kepada Pemerintahan Desanya yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Namunakan tetapi pelatihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa. Hasil penelitian berdasarkan wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa sub indikator Evaluasi Bagaimana bentuk Evaluasi yang diberikan pemerintahan Kecamatan kepada Desa Pulau Lancang yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada bentuk evalausi yang diberikan itu turun langsung ke Desa melihat bagaimana kerja aparatur Desa dengan cara diskusi langsung dengan perangkat Desa atau Masyarakat. Namunakan tetapi evaluasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten tidak pernah dilakukan secara langsung ke pihak Pemerintahan Desa Namun dari pihak Kabupaten tidak pernah melakukan Pelatihan terhadap Pemerintahan Desa. Kesimpulan penulis dengan informan dilapangan dari hasi



Indikator Evaluasi dapat penulis sampaikan bahwa pihak pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan Evaluasi kepada pemerintahan Desa itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun dari pihak Kabupaten tidak pernah melakukan Evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.

5. SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa (Study kasus di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020) sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk kedua orang tua penulis yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Untuk Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Sis selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing I, Bapak Drs. H. Sumarli, MM selaku dosen Pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Ali, Faried. 2015. *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Deddy, Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Handyaningrat. Soewanto. 2002. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen Haji Masanggung* Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Istijanto 2006. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Gramedia Pusaka Utama
- Nugroho, Riant. 2017. *Public policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Nugroho, Riant. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pres: Jakarta
- Pasolong Harbani. 2007 *Administrasi Publik*. Alfabeta Jakarta.
- Sugiono. 2014 *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Saudjana 2000. *Program Pendidikan* Bandung. Falah Production.
- Sutiriso. Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi Pertama. Jakarta: 1 Kencana.
- Syadman, Gouzali 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Djembatan.
- Syafie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung
- The Liaang Gie 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*.
- ThoHA, Miftah 2004. *Pembinaan Organisasi* Jakarta: Pt Raja Rafindo.
- Widodo. Adnan 1984. *Pola Orang Pemerintahan* Jakarta Pt. Maju Jaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah